

← **Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh ...**

pajak.go.id

Kepada: Saya ▾



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-39530/CT/KPP.1402/2026**
Tanggal : 17 Maret 2026

NPWP : 6472056712710001

Nama Wajib Pajak : SRI MARIANA LOGIN PARDOSI

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 17 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax
DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak
memerlukan tanda tangan basah.



Direktorat Jenderal Pajak

Kunjungi situs [↗](#)



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/1828527

Pembetulan Ke Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 144304060722000
A.2 NIP/ NRP : 197112272006042001
A.3 NAMA : SRI MARIANA LOGIN P. SE.
A.4 PANGKAT/ GOL : III/d / Penata Tk I
A.5 NAMA JABATAN : Jurusita Pengganti Tk.Pertama Kelas IA / Kelas
ITUN
A.6 JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI PEREMPUAN
A.7 NIK : 6472056712710001
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK / 0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	58.378.600
2.	TUNJANGAN ISTRI	5.837.860
3.	TUNJANGAN ANAK	2.335.144
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	3.290.000
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	116
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	70.407.638
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	144.304.878
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	6.000.000
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.709.595
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	8.709.595
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	135.595.283
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	135.595.283
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	81.595.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	6.239.250
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	6.239.250
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	5.858.096
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	5.858.096
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	381.154
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	381.154

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157
D.4 Tanggal : 3 1 da 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah